MENGGALI TEORI KOMUNIKASI JÜRGEN HABERMAS TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI RUANG PUBLIK DIGITAL: STUDI KASUS APLIKASI X

Rossalia Amanda[1)], Berliandini Utami[2)], Tobat Lumban Gaol[3)], Deni Aries Kurniawan[4)], Vieronica Varbi Sununianti[5)], Istiqoma[6)]
Universitas Sriwijaya
rossaliamnd14@gmail.com

Abstract
This article explores the dynamics of the digital public sphere through the theoretical lens of Jürgen Habermas' communication theory, focusing specifically on how the social media platform X (formerly Twitter) serves as a site of civic participation in contemporary public discourse. Employing a qualitative approach through comprehensive library research, this study engages critically with literature on communicative action, the transformation of the public sphere, and digital communication behavior, particularly in the Indonesian context. The findings reveal that although platform X provides technical infrastructure for rapid and widespread opinion exchange, public discussions on the platform are often trapped in polarization, identity-based digital tribalism, and emotionally charged interactions that hinder the realization of communicative rationality as envisioned by Habermas. The dominance of engagement-driven algorithms, rampant misinformation, and the general lack of digital literacy further exacerbate this condition, rendering digital platforms more as arenas of ideological conflict and disinformation than spaces of meaningful deliberation. Consequently, this article recommends strengthening digital literacy grounded in ethical discourse principles, advocating for algorithmic transparency and fairness, and encouraging the proactive involvement of educational institutions and state actors in shaping a healthier, more reflective, and inclusive digital public sphere in alignment with Habermas' ideals of deliberative democracy.
Keywords: Habermas, Digital public sphere, Communicative rationality, Civic participation

Abstrak
Artikel ini membahas dinamika ruang publik digital melalui kerangka teori komunikasi Jürgen Habermas, dengan fokus utama pada bagaimana platform media sosial X (sebelumnya Twitter) berfungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam diskursus publik kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, mengkaji literatur yang relevan terkait teori tindakan komunikatif, transformasi ruang publik, serta perilaku komunikasi digital dalam konteks Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun platform X memiliki infrastruktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat secara luas dan cepat, dalam praktiknya diskursus publik di dalamnya justru banyak terjebak dalam polarisasi, tribalism digital, serta interaksi emosional yang menghambat terjadinya komunikasi rasional sebagaimana diidealkan Habermas. Dominasi algoritma, penyebaran hoaks, serta lemahnya literasi digital masyarakat memperparah kondisi ini dan menyebabkan ruang publik digital menjadi arena konflik dan disinformasi, bukan deliberasi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi digital berbasis etika diskusi, pengaturan algoritma yang lebih transparan dan berkeadilan, serta peran aktif lembaga pendidikan dan negara dalam membentuk ruang publik digital yang lebih sehat, reflektif, dan inklusif sebagai wujud konkret dari cita-cita demokrasi deliberatif Habermas.
Kata Kunci: Habermas, Ruang publik digital, Rasionalitas komunikatif, Partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, ruang publik tidak lagi terbatas pada forum fisik seperti balai kota atau diskusi tatap muka, melainkan telah meluas ke platform daring yang memungkinkan interaksi lintas batas geografis dan sosial Menurut Habermas, ruang public adalah sebuah area sosial Dimana individu dapat berdiskusi secara bebas dan rasional mengenai isu-isu public tanpa tekanan dari negara atau kekuatan ekonomi (Habermas, 1989). Salah satu platform yang menonjol dalam konteks ini adalah X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), yang sering menjadi arena perdebatan publik di Indonesia. Dengan lebih dari 24 juta pengguna aktif di Indonesia pada tahun 2024, X telah menjadi medium utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan terlibat dalam diskursus sosial-politik. Fenomena ini mencerminkan transformasi signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam ruang publik, di mana interaksi digital menjadi

sarana utama dalam membentuk opini dan kebijakan publik.

Namun, meskipun platform digital seperti X menawarkan potensi besar untuk memperluas partisipasi publik, realitasnya sering kali tidak sejalan dengan ideal ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Habermas menekankan pentingnya diskursus yang rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi dalam ruang publik sebagai fondasi demokrasi deliberatif. Di platform digital, diskursus sering kali terfragmentasi dan didominasi oleh kelompok-kelompok dengan pandangan seragam, yang memperkuat polarisasi dan menghambat dialog konstruktif (Dr. Rulli Nasrullah, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi teoritis ruang publik digital dan praktik aktualnya di lapangan (Bouway and Mbelanggedo, 2025).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap polarisasi ini adalah algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Mekanisme ini menciptakan "filter bubble" dan "echo chamber," di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka, sementara pandangan yang berbeda disaring atau diabaikan (Raya, 2025). Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial sering kali memperkuat bias informasi dengan hanya menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna cenderung terjebak dalam gelembung informasi yang mempersempit perspektif dan memperkuat polarisasi sosial (Sunstein, 2018). Akibatnya, pengguna menjadi kurang terbuka terhadap perspektif alternatif, yang memperkuat bias dan mengurangi kemampuan untuk berempati dengan pandangan yang berbeda. Fenomena ini tidak hanya menghambat diskursus rasional tetapi juga memperdalam perpecahan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, algoritma media sosial juga cenderung memprioritaskan konten yang memicu respons emosional kuat, seperti kemarahan atau ketakutan, karena konten semacam itu lebih mungkin untuk dibagikan dan mendapatkan interaksi tinggi (Sutisna, 2024). Hal ini mempercepat penyebaran disinformasi dan berita palsu, yang sering kali lebih menarik secara emosional dibandingkan dengan informasi factual (Nasional, 2025). Penyebaran informasi yang menyesatkan ini tidak hanya merusak kualitas diskursus publik tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan politik masyarakat, seperti yang terlihat dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk merefleksikan dinamika ruang publik digital melalui lensa teori komunikasi Habermas untuk memahami batasan dan peluang partisipasi masyarakat dalam era digital. Habermas menekankan pentingnya diskursus yang dibangun atas dasar rasionalitas komunikatif, di mana semua peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, dan keputusan kolektif dicapai melalui pertimbangan logis yang bebas dari tekanan eksternal. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini sulit tercapai di platform digital yang dikendalikan oleh logika kapitalisme data dan algoritma viralitas. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji bagaimana teori ruang publik Jürgen Habermas dapat diaplikasikan dalam menganalisis fenomena debat dan partisipasi masyarakat di platform X, serta menelaah sejauh mana ideal-ideal komunikatif tersebut masih dapat ditemukan atau justru terdegradasi dalam praktik komunikasi digital kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif studi pustaka, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis terhadap transformasi ruang publik di era

platform dan membuka ruang diskusi akademik mengenai arah kebijakan serta pendidikan komunikasi publik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep teori komunikasi Jürgen Habermas dalam konteks ruang publik digital. Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada relevansinya untuk memahami secara mendalam kerangka teoritik, tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang empirik, sehingga memungkinkan peneliti merangkum berbagai perspektif akademik yang telah dipublikasikan. Sumber data utama mencakup buku-buku klasik dan kontemporer karya Habermas, artikel jurnal terindeks internasional, prosiding konferensi, serta laporan riset dan artikel media daring yang membahas dinamika diskursus di platform X. Semua sumber dipilih secara purposive dengan kriteria tahun terbit dalam satu dekade terakhir untuk menjaga kekinian pembahasan, sekaligus menjamin keluasan perspektif mulai dari aspek rasionalitas komunikatif hingga tantangan algoritmik.

Analisis data dilakukan melalui langkah deskriptif-analitis yang berfokus pada penafsiran teks dan sintesis konseptual. Pertama, kerangka teoritik Habermas terutama teori tindakan komunikatif dan transformasi ruang public ditelaah untuk merumuskan indikator-indikator idealitas diskursus rasional. Selanjutnya, literatur tentang media sosial dan algoritma khususnya penelitian mengenai efek “filter bubble” dan “echo chamber” di platform X dikaji untuk mengidentifikasi sejauh mana kondisi digital saat ini memenuhi atau menyimpang dari indikator tersebut. Proses analisis melibatkan perbandingan lintas sumber (cross-source comparison) untuk mengungkap pola konsistensi maupun kontradiksi antara teori dan praktik komunikasi digital, diikuti dengan penarikan simpulan awal yang kritis terhadap relevansi teori Habermas di era platform.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Publik dan Tantangan Media Digital

Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya adanya arena diskusi yang bebas dari dominasi negara dan pasar, di mana warga negara dapat berdialog secara rasional demi kepentingan Bersama (Prasetyo, 2022). Namun, dalam konteks media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), ideal ini menghadapi tantangan signifikan. Platform-platform ini beroperasi dalam kerangka kapitalisme digital, di mana interaksi pengguna sering kali dimediasi oleh algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan untuk mendorong diskursus rasional. Sebagai contoh, algoritma dapat memperkuat konten yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan atau ketakutan, yang berpotensi menghambat deliberasi publik yang sehat (Wahyudi, 2024).

Lebih lanjut, desain platform media sosial memengaruhi dinamika ruang publik digital. Antarmuka pengguna, fitur interaktif, dan mekanisme moderasi konten dapat membentuk cara pengguna berinteraksi dan berdiskusi. Misalnya, fitur retweet dan like pada X dapat mendorong penyebaran cepat informasi tanpa verifikasi, sementara kebijakan moderasi yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap platform sebagai ruang diskusi yang adil (Zainu Ridlo *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan kebijakan platform memiliki peran penting dalam menentukan kualitas diskursus publik di ruang digital.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan

kritis terhadap media sosial sebagai ruang publik. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana struktur kekuasaan dan ekonomi memengaruhi arsitektur platform digital dan, pada gilirannya, memengaruhi partisipasi publik.

Dengan demikian, upaya untuk menciptakan ruang publik digital yang lebih inklusif dan deliberatif memerlukan intervensi pada level desain platform, kebijakan moderasi, dan literasi digital pengguna (Kuswandoro, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Habermas tentang pentingnya struktur institusional yang mendukung diskursus rasional dalam masyarakat demokratis.

Komunikasi Rasional vs Polarisasi Digital

Dalam kerangka teori tindakan komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, komunikasi ideal seharusnya berlangsung dalam ruang publik yang memungkinkan partisipasi setara, bebas dari dominasi, dan berorientasi pada pencapaian konsensus melalui argumentasi rasional. Namun, dalam praktiknya, dinamika diskusi publik di platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter) sering kali menyimpang dari ideal tersebut. Alih-alih menjadi arena deliberasi yang rasional, platform ini kerap menjadi medan pertempuran opini yang sarat dengan emosi, serangan ad hominem, dan polarisasi tajam antar kelompok. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma platform yang cenderung menampilkan konten yang memicu keterlibatan emosional tinggi, sehingga mempersempit ruang bagi pertukaran argumen yang berbasis pada logika dan fakta. Sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh Rasyid *et al.* (2025), algoritma media sosial memiliki kecenderungan untuk memperkuat konten yang bersifat sensasional dan kontroversial, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya diskursus publik yang sehat dan rasional.

Lebih lanjut, dinamika polarisasi di media sosial juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan etika komunikasi pengguna. Alfazri and Syahputra (2024) menyoroti bahwa meskipun media sosial menawarkan peluang untuk konektivitas global dan partisipasi publik, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan perilaku komunikasi yang tidak etis, seperti ujaran kebencian dan cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang etika komunikasi dan kemampuan kritis dalam menilai informasi, pengguna media sosial rentan terjebak dalam tribalism digital, di mana solidaritas kelompok lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran melalui dialog rasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pemahaman kritis terhadap dinamika komunikasi di ruang digital. Pendidikan literasi digital harus mencakup aspek-aspek seperti kesadaran akan bias algoritma, kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan inklusif. Sebagaimana disarankan dalam artikel oleh Koehler (2023), mengatasi tribalism digital memerlukan upaya sadar untuk mengekspos diri pada berbagai perspektif dan membangun empati terhadap pandangan yang berbeda. Dengan demikian, meskipun media sosial memiliki potensi untuk memperluas partisipasi publik, tanpa pendekatan yang kritis dan reflektif, platform ini dapat justru memperdalam fragmentasi sosial dan menghambat terwujudnya ruang publik yang rasional sebagaimana diidealkan oleh Habermas.

Tantangan lainnya:

1. **Manipulasi dan Penyalahgunaan Media Sosial**

Emilio Ferrara dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan disinformasi, menyerang individu, atau melakukan manipulasi politik. Kekurangan sistem verifikasi konten yang efektif di platform seperti Twitter dan Facebook meningkatkan risiko seperti perundungan siber dan ujaran kebencian, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna muda.

2. Disinformasi dan Berita Palsu

Menurut Kai Shu dan rekan-rekannya, disinformasi dan berita palsu telah menjadi fenomena global karena pertumbuhannya yang pesat, terutama di media sosial. Mereka menekankan pentingnya pengembangan metode deteksi dan mitigasi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini.

2. **Keterbatasan Perhatian Individu dan Viralisasi Informasi Berkualitas Rendah**

Xiaoyan Qiu dkk. menemukan bahwa keterbatasan perhatian individu dan overload informasi menyebabkan informasi berkualitas rendah dapat tersebar luas, meskipun kualitasnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas online tidak selalu mencerminkan kualitas informasi.

3. **Tantangan Hak Cipta dan Perlindungan Konten**

Media digital memudahkan pembuatan, modifikasi, dan berbagi konten, yang menantang hukum hak cipta yang ada. Masalah seperti pembajakan online dan penggunaan konten tanpa izin semakin kompleks, terutama di platform seperti TikTok, di mana banyak musik digunakan tanpa lisensi resmi.

4. **Polarisasi Sosial dan Nasionalisme Tribalis**

Merlyna Lim mengamati bahwa media sosial di Indonesia telah memperburuk polarisasi sosial dan kebangkitan nasionalisme tribalis. Algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang sudah ada, menciptakan ruang digital yang terpolarisasi dan memperburuk ketegangan sosial.

5. **Peraturan Pemerintah dan Keseimbangan Industri Media**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan platform digital seperti Facebook dan Google untuk membayar media atas konten mereka. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang adil antara platform digital dan industri media, serta memastikan keberlanjutan ekosistem berita di Indonesia.

6. **Potensi dan Keterbatasan Platform X**

Platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) telah menjadi salah satu medium utama dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial di era digital. Kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas memungkinkan pengguna untuk terlibat langsung dalam diskursus publik, menciptakan ruang bagi ekspresi opini dan mobilisasi sosial. Namun, potensi ini tidak terlepas dari tantangan signifikan, seperti penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian yang dapat menghambat realisasi ruang publik yang ideal. Sebagai contoh, penelitian oleh Andriani *et al.* (2024) menyoroti pentingnya literasi digital dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, yang menjadi tantangan komunikasi di masyarakat digital.

Lebih lanjut, tantangan tersebut diperparah oleh algoritma platform yang

cenderung memperkuat konten yang memicu emosi, sehingga mempersempit ruang bagi dialog rasional dan deliberatif. Hal ini bertentangan dengan prasyarat ruang publik menurut Habermas, yang menekankan pentingnya kesetaraan akses, kebebasan berekspresi, dan orientasi pada kebenaran dalam diskursus publik. Dalam konteks ini, Nasution (2020) menekankan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik digital harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.

Untuk mewujudkan ruang publik digital yang ideal, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat pengguna. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sementara platform media sosial harus mengembangkan algoritma yang mendukung penyebaran informasi yang akurat dan konstruktif. Di sisi lain, masyarakat pengguna harus meningkatkan literasi digital mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam diskursus publik. Fitriani *et al.* (2025) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di media sosial, serta perlunya pendekatan yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa platform X, sebagai representasi ruang publik digital kontemporer, menyimpan potensi besar untuk menjadi medium diskursus demokratis dan partisipatif sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka teori ruang publik Jürgen Habermas. Potensi tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat, memperdebatkan isu sosial-politik, hingga menggalang solidaritas melalui wacana publik secara real-time. Namun, di sisi lain, ideal-ideal Habermasian seperti rasionalitas komunikatif, kesetaraan partisipasi, dan kebebasan dari dominasi institusional belum sepenuhnya terwujud dalam praktik komunikasi digital saat ini. Justru, yang banyak ditemukan adalah kecenderungan interaksi berbasis emosi, polarisasi tajam, serta fragmentasi komunitas digital yang menyebabkan menyempitnya ruang deliberatif dan melemahnya struktur argumentatif dalam diskursus publik.

Lebih lanjut, tantangan utama dalam mewujudkan ruang publik digital yang rasional terletak pada struktur teknologis dan kultural dari platform itu sendiri. Algoritma media sosial yang menekankan pada keterlibatan tinggi secara emosional sering kali memprioritaskan konten yang bersifat sensasional ketimbang edukatif atau argumentatif, sehingga menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi terwujudnya diskusi yang sehat dan berbasis alasan. Tribalism digital, echo chamber, serta persebaran hoaks dan disinformasi memperparah situasi ini dan membuat media sosial lebih menyerupai ruang perseteruan ketimbang ruang pertukaran gagasan. Karena itu, pemaknaan terhadap teori Habermas dalam konteks ruang publik digital tidak bisa dilepaskan dari kritik terhadap kapitalisme platform dan struktur kekuasaan yang mengatur dinamika interaksi digital. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya memaknai ruang publik digital secara normatif, tetapi juga kritis terhadap faktor-faktor struktural yang membentuk pola komunikasi masyarakat di era ini.

Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan agar lembaga pendidikan, pengambil kebijakan, serta pengelola platform digital memperkuat literasi digital masyarakat dengan menekankan pada aspek etika diskusi, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran terhadap manipulasi algoritmik dalam konsumsi informasi. Selain itu, penting juga

untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital, misalnya dengan memperkuat regulasi moderasi konten tanpa mencederai hak sipil warga digital. Penelitian lanjutan sangat diperlukan, khususnya yang bersifat empiris, untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik moderasi konten dan rancangan algoritma berdampak langsung terhadap kualitas wacana publik yang berkembang di media sosial seperti X. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan teori kritis, regulasi, dan edukasi, diharapkan ruang publik digital dapat lebih mendekati cita-cita Habermas sebagai arena rasional-kritis yang demokratis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfazri, M. and Syahputra, J. (2024) 'LITERASI DIGITAL DAN ETIKA KOMUNIKASI DALAM KONTEKS MEDIA SOSIAL', *Jurnal syiar-syiar*, 4, pp. 50–62.

Andriani, A.D. *et al.* (2024) 'MODEL KOMUNIKASI LITERASI DIGITAL DALAM', 13(2), pp. 439–464.

Bouway, K. and Mbelanggedo, N. (2025) 'PENDEKATAN HOLISTIK PADA KOMPETENSI GURU PAK: MENYEIMBANGKAN ASPEK TEOLOGIS, PEDAGOGIS, DAN SOSIAL', *IMITATIO CHRISTO Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1, pp. 174–192. Available at: https://doi.org/10.63536/imitatiochri.

Dr. Rulli Nasrullah, M.S. (2021) 'Manajemen Komunikasi Digital', *Al-Idarah*, pp. 1–313. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ANYhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=komunikasi&ots=tMktCJj3uY&sig=TeFxPHIQAzifXPG4sc6MftqgVxs.

Fitriani, N.I. *et al.* (2025) 'Kebebasan Berpendapat di Era Media Sosial : Tantangan dan Solusi Hak Asasi Manusia'.

Habermas, J. (1989) 'The structural transformation of the public sphere', *American Journal of Germanic Linguistics and Literatures*, p. 103.

Koehler, J. (2023) *Tribalism in the Age of Social Media*. Paychology Today. Available at: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-school-walls/202304/tribalism-in-the-age-of-social-media.

Kuswandoro, W.E. (2024) 'Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian'. Available at: https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=By0DEQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=kebijakan+publik+perspektif+politik+advokasi+civil+society+dan+kepartaian%5C&ots=HTcI8HztrP%5C&sig=UzVYizZxHQs73ErvSUl-sfyUgLM.

Nasional, G. (2025) *Media Sosial sebagai Katalisator Polarisasi Politik*.

Nasution, L. (2020) 'Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital', *'Adalah*, 4(3), pp. 37–48. Available at: https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200.

Prasetyo, A.A. (2022) 'Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermasdan Ruang Publik Digital', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), pp. 213–218. Available at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/46177.

Rasyid, E. *et al.* (2025) 'Interpersonal communication patterns of Aisyiyah in cultural da ' wah activities in isolated tribal communities Pola komunikasi interpersonal Aisyiyah dalam aktivitas dakwah kultural pada masyarakat suku terasing Interpersonal communication patterns of Aisyiyah in cultural da ' wah activities in isolated tribal communities Pola komunikasi interpersonal Aisyiyah dalam aktivitas dakwah kultural pada masyarakat suku terasing', 19. Available at:

https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art12.

Raya, O.L. (2025) *Dampak Algoritma Media Sosial Terhadap Polarisasi Opini Publik*.

Sunstein, C.R. (2018) *DIVIDED DEMOCRACY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA*, *#republic: Divided Democracy in ihe Age of Social Media*. Available at: https://doi.org/10.1111/jcom.1234.

Sutisna, N. (2024) 'Digital Marketing for Politics (Pemasaran Politik Era Digital)', p. 107.

Wahyudi, R.F. and Kom, M.I. (2024) 'Demokrasi di Ruang Publik dan Media Sosial dalam Perspektif', *RETORIKA Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(2), pp. 17–32. Available at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/46177.

Zainu Ridlo, A. *et al.* (2024) 'Ruang Publik Baru Melalui Desain Di Media Sosial', *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 01(04), pp. 719–723. Available at: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index.